



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SISWANTANA PUTRI RACHMATIKA
2. Jabatan : PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN
3. NHK : 142264

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850.000.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di TAMAN CIPAYUNG BLOK 16 NO. 124, RT. 6 RW. 27 KODE POS. 16417 , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di PERUM. TAMAN CIPAYUNG BLOK 30 NO. 314 RT. 02 RW. 27 Kode Pos. 16417, ---, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	103.400.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HIBAH TANPA AKTA Rp. 87.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	72.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	285.529.953
F. HARTA LAINNYA	Rp.	18.500.000
Sub Total	Rp.	1.329.979.953
III. HUTANG	Rp.	224.651.951
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.105.328.002

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Oktober 2018**.



4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.